

Earnings Management, Liquidity, and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as a Moderating Variable (A Study of Manufacturing Companies in the Food and Beverages Subsector Listed on the Indonesia Stock Exchange 2020-2024)

[Manajemen Laba, Likuiditas, Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)]

Meirza Fazriyah¹⁾, Herman Ernandi²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hermanernandi@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the influence of earnings management, liquidity, and corporate social responsibility on tax aggressiveness, with corporate governance as a moderating variable. The research subjects were manufacturing companies in the food and beverage subsector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. The study employed a quantitative approach with SmartPLS analysis. The data used were company financial reports as secondary data. The results showed that earnings management, liquidity, corporate social responsibility influenced tax aggressiveness. Corporate governance moderated the relationship between liquidity and corporate social responsibility on tax aggressiveness. However, corporate governance did not moderate the effect of earnings management on tax aggressiveness. These findings indicate that corporate governance is not yet effective in monitoring earnings management practices, but can strengthen the influence of liquidity and corporate social responsibility on corporate tax aggressiveness and provides implications for companies in improving the quality of tax management.*

Keyword: *Earnings Management, Liquidity, Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness, Corporate Governance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba, likuiditas, *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SmartPLS. Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, likuiditas, *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Corporate governance mampu memoderasi hubungan likuiditas dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Namun, corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan belum efektif dalam mengawasi praktik manajemen laba, tetapi mampu memperkuat pengaruh likuiditas dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak perusahaan serta memberikan implikasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan dan transparansi laporan keuangan secara berkelanjutan untuk mendukung kepatuhan pajak yang lebih optimal di masa mendatang perusahaan.

Kata kunci: Manajemen Laba, Likuiditas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan

I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang krusial untuk mendukung keuangan suatu negara karena menjadi sumber utama pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan keamanan. Dari sudut pandang perusahaan, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang mampu mengurangi laba bersih atau pendapatan perusahaan. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk mencari cara-cara yang sah maupun tidak sah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sementara itu, pemerintah

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

menganggap pajak sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan bersama, sehingga membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi [1]. Oleh karena itu, pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang cenderung mengurangi kewajibannya melalui berbagai strategi, termasuk yang dikategorikan sebagai agresivitas pajak, yang bisa berdampak negatif pada keadilan sosial dan penerimaan negara [2].

Agresivitas pajak masih menjadi salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam penelitian akuntansi dan perpajakan. Agresivitas pajak mengacu pada tindakan perusahaan untuk menurunkan penghasilannya yang kena pajak melalui berbagai bentuk perencanaan pajak seperti rekayasa penghasilan perusahaan [3]. Perusahaan sering menggunakan strategi ini untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan keuntungan perusahaan, meskipun hal ini dapat menimbulkan kontroversi dari segi etika. Faktor internal dan eksternal, seperti manajemen laba, likuiditas, dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dapat memengaruhi praktik ini. Manajemen laba, misalnya, dapat memengaruhi seberapa agresif perusahaan dalam merencanakan pajak, karena perusahaan mungkin memilih untuk melaporkan laba yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak. *Corporate governance*, sebagai bentuk tata kelola yang baik, berperan dalam menekan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dengan memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai aturan dan etika. Dengan adanya *corporate governance* yang kuat, perusahaan diharapkan lebih transparan dalam laporan keuangan dan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Agresivitas pajak dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan perusahaan, namun juga akan memberikan dampak pada pendapatan negara yang berasal dari pajak menurun. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2020	1.198,82	1.072,11	89,43
2021	1.229,58	1.278,65	103,99
2022	1.484,96	1.716,763	115,61
2023	1.818,24	1.867,87	102,73
2024	1.988,90	1.932,40	97,20

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)

Manajemen laba dapat memengaruhi perilaku agresivitas pajak, dimana elemen pajak masih menjadi salah satu elemen yang diatur nilainya untuk mencapai laba yang lebih tinggi. Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola laba bersih perusahaan demi kepentingan individu atau perusahaan dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada [4]. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih agresif dalam laporan keuangannya cenderung mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat manajemen laba, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, begitu pula sebaliknya [5]. Namun, penelitian lain menyebutkan manajemen laba tidak memiliki pengaruh pada pengurangan beban pajak. [6]. Ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen laba dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dampaknya terhadap pajak tidak selalu signifikan.

Likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, juga dapat memengaruhi strategi terkait pajak. Ketika likuiditas perusahaan rendah, perusahaan mungkin kesulitan

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk membayar pajak. Faktor ini menjadi penting karena dampak likuiditas terhadap keputusan pajak dapat mencerminkan kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Kondisi ini dapat memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah alternatif dalam pengelolaan pajak yang lebih agresif. Sehingga, perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung menghindari pembayaran pajak untuk memperbaiki kondisi keuangannya [7]. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa likuiditas memberikan pengaruh positif yang signifikan pada agresivitas pajak. Dengan semakin tingginya likuiditas perusahaan, maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak perusahaan, dan begitu juga sebaliknya [8]. Namun, ada juga studi yang menjelaskan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui indikator tertentu [9].

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk pengungkapan yang mencerminkan keterkaitan antara perusahaan dengan masyarakat di lingkungan di sekitarnya [10]. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan *CSR* sering diasumsikan lebih berkomitmen terhadap etika dan kepatuhan, termasuk dalam hal perpajakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, *CSR* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jika semakin baik pengungkapan *CSR*nya, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak [11]. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa keterkaitan antara *CSR* dan agresivitas pajak bersifat kompleks, dimana hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan [12]. Selain itu, tujuan utama dari pengungkapan *CSR* bukan untuk memperoleh *legitimasi* dalam bidang perpajakan.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan memiliki peran penting sebagai mekanisme pengendalian internal dalam perusahaan. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk *corporate governance*, yang merupakan prinsip pengelolaan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan.[3]. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *corporate governance/CSR* dapat memperkuat pengaruh dari manajemen laba terhadap agresivitas pajak [13]. Selain itu, *corporate governance* yang diwakili oleh komite audit juga dapat memperkuat hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak, yang menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga, komite audit sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak [7]. Selain itu, *corporate governance* juga dapat memperkuat hubungan antara *CSR* dan agresivitas pajak [10]. Studi lain menemukan bahwa *CSR* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *corporate governance* [1].

Seiring diberlakukannya kebijakan *Global Minimum Tax (GMT)*, perusahaan-perusahaan publik, termasuk sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan transparansi fiskal dan mengurangi praktik agresivitas pajak pada perusahaan. Perubahan ini menjadi bagian salah satu upaya global untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan seperti likuiditas, manajemen laba, dan *corporate social responsibility (CSR)* memberikan pengaruh yang bervariasi terhadap agresivitas pajak [15]. Di sisi lain, peran tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor-faktor internal dan agresivitas pajak masih belum banyak diteliti secara komprehensif, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memberikan kontribusi informasi akademis dalam memahami bagaimana karakteristik internal dan tata kelola perusahaan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak ditengah fenomena perpajakan global yang semakin ketat.

Penelitian ini memiliki teori dasar berupa teori keagenan (*agency theory*), dimana teori ini membahas hubungan antara pihak agen dan prinsipal. Dimana agen merujuk pada manajemen atau pengelola perusahaan, sedangkan prinsipal merujuk pada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Teori ini menyorot adanya potensi perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, dimana perbedaan ini akan dapat menimbulkan konflik [16]. Dalam hubungan keagenan, prinsipal memberikan tanggung jawab kepada agen untuk menjalankan aktivitas bisnis atas nama mereka, serta memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi prinsipal. Permasalahan muncul ketika manajemen berusaha menekan beban pajak guna meningkatkan nilai perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak tetapi pendekatan ini tidak selalu disetujui oleh pemegang saham,

karena dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi terhadap informasi keuangan perusahaan, yang berisiko menurunkan kepercayaan dan integritas perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul ini karena isu yang diteliti berkaitan dengan fenomena terkini dalam regulasi kepatuhan pajak serta dengan fenomena yang baru terjadi peneliti ini mengulik selama ini faktor faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak pada sebuah perusahaan. Selain itu, praktik agresivitas pajak masih sering dijumpai dalam dunia usaha. Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dalam suatu perusahaan sehingga dapat memberikan informasi lebih tentang faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak sebuah perusahaan. Selain itu pada penelitian ini memilih untuk menggunakan perusahaan manufaktur subsektor food and beverages sebagai objek dari penelitian karena sektor ini terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, sehingga volume kebutuhan terhadap kebutuhan pokok juga terus meningkat [14]. Di antara subsector lain, industri makanan dan minuman memberikan kontribusi pajak terbesar. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga cenderung memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian berfokus apakah variabel manajemen laba, likuiditas dan *corporate social responsibility/CSR* berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak dan apakah *corporate governance* mampu memoderasi hubungan manajemen laba, likuiditas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

Tabel 2.1

Kontribusi Subsektor Food & Beverages terhadap Industri Pengolahan dan Ekonomi Nasional

Tahun	Kontribusi F&B terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	Pertumbuhan Industri F&B (%)	Posisi sebagai Kontributor Penerimaan Pajak Industri Pengolahan
2020	36,4	1,58	1 (tertinggi)
2021	37,7	2,54	1 (tertinggi)
2022	38,4	4,9	1 (tertinggi)
2023	38	5,33	1 (tertinggi)
2024	40,3	5,82	1 (tertinggi)

Sumber : kemenperin.go.id kontribusi industri makanan dan minuman tahun 2020 - 2024

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. *Corporate governance* dianggap relevan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* karena dianggap mampu memberikan kuasa dalam menurunkan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan temuan yang beragam serta meneliti lebih dalam topik agresivitas pajak yang masih menjadi isu menarik karena tidak selalu melanggar peraturan perpajakan. Namun, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam atau tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam memperluas cakupan objek maupun menambah variabel-variabel sejenis yang relevan.

II. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengaruh Manajemen Laba (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Manajemen laba merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur dan menyajikan informasi keuangan dengan cara tertentu, sebagai upaya mengatur laporan keuangan perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang sering kali bertujuan untuk memperbaiki citra keuangan.[17] Dalam teori dasar berupa teori keagenan, praktik ini mencerminkan tindakan oportunistik dari agen (manajer) yang berusaha mengutamakan kepentingan pribadi, meskipun berisiko merugikan pihak pemilik atau pemegang saham. Tindakan ini muncul akibat ketidakseimbangan informasi antara manajer dan investor, dimana manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi internal perusahaan. Karena itulah, manajemen laba menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan mengenai konflik keagenan. Praktik manajemen laba memungkinkan manajer untuk memperlihatkan kinerja keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memicu mereka untuk mengadopsi strategi agresif dalam perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam praktik agresivitas terkait pajak [18]. Manajemen laba merupakan aspek krusial dalam mengidentifikasi besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, praktik manajemen laba juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengoptimalkan beban pajak yang ditanggung oleh entitas perusahaan. raktik manajemen laba dapat berdampak pada tingkat agresivitas pajak, mengingat komponen pajak sering kali menjadi salah satu unsur yang disesuaikan untuk meningkatkan pencapaian laba. Secara umum, manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer dalam mengelola laba bersih perusahaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi, dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam kebijakan akuntansi yang tersedia [3]. Manajemen laba memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak, di mana praktik ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhinya. Semakin efektif manajemen laba yang diterapkan perusahaan, maka manajer cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk menurunkan atau meminimalkan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan [19]. Namun beberapa penelitian lain menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan beban pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun manajemen laba berpotensi menurunkan kewajiban pajak, pengaruhnya terhadap aspek perpajakan tidak selalu berarti secara statistik maupun praktis [5]. Dengan adanya uraian diatas bisa ditarik sebuah hipotesis untuk pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

H1 : Manajemen Laba Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

B. Pengaruh Likuiditas (X2) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, khususnya kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan pengelolaan manajemen yang efektif, karena perusahaan yang sehat secara finansial umumnya mampu menjaga likuiditasnya pada tingkat yang optimal. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk kewajiban jangka pendek yang menjadi bagian penting dalam operasionalnya [20]. Dalam kerangka teori dasar yang dipakai yaitu teori keagenan, tingkat likuiditas yang tinggi dapat memberikan kenyamanan kepada manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik, karena risiko kebangkrutan yang rendah. Sebaliknya, ketika likuiditas rendah, manajer mungkin akan berusaha menutupi kinerja keuangan yang buruk melalui praktik manajemen laba atau strategi jangka pendek lainnya yang dapat merugikan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, likuiditas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tekanan atau peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik. Likuiditas merupakan faktor yang

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

mungkin berpengaruh terhadap strategi perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan. Tingkat likuiditas juga memengaruhi pendekatan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Ketika kondisi likuiditas rendah, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran pajak. Situasi ini mencerminkan pentingnya likuiditas sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan dan dapat mendorong pengambilan keputusan pajak yang lebih agresif. Oleh karena itu, perusahaan dengan likuiditas yang rendah cenderung menghindari pembayaran pajak sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi keuangannya [6]. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam suatu perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik, maka kemungkinan untuk mengalami keterlambatan atau gagal bayar pajak akan lebih rendah. Sebaliknya, kondisi likuiditas yang menurun mencerminkan kesehatan keuangan yang buruk, yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi agresivitas pajak sebagai upaya untuk meningkatkan laba. Oleh karena itu, likuiditas memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan bersikap agresif dalam pengelolaan pajaknya [16]. Namun, terdapat penelitian lain yang menyanggah temuan tersebut, di mana hasil studi tersebut menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana diukur melalui indikator-indikator tertentu. [8]. Dengan adanya uraian diatas bisa ditarik sebuah hipotesis untuk pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak.

H2 : Likuiditas Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

C. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara etis. Implementasi CSR memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif sosial maupun lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas operasional perusahaan [21]. Berlandaskan dengan teori dasar yaitu teori keagenan CSR dapat berperan ganda. Di satu sisi, CSR menjadi alat untuk memperbaiki citra perusahaan dan menunjukkan bahwa manajemen peduli terhadap keberlanjutan, yang dapat mengurangi konflik antara agen dan prinsipal. Namun, di sisi lain, CSR juga dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk memperbesar citra baik mereka dan menyamarkan tindakan yang kurang etis atau oportunistik, terutama dalam situasi asimetri informasi tinggi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki peran penting dalam operasional perusahaan, karena semakin tinggi kualitas pelaksanaan CSR, citra dan reputasi perusahaan cenderung akan dinilai lebih positif. CSR juga memiliki keterkaitan yang erat dengan agresivitas pajak, di mana perusahaan yang aktif menjalankan program CSR sering diasosiasikan dengan tingkat komitmen yang tinggi terhadap etika dan kepatuhan, termasuk dalam aspek perpajakan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat CSR yang baik umumnya menunjukkan kecenderungan lebih rendah dalam melakukan agresivitas pajak, karena implementasi CSR yang baik mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan [22]. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki peran penting dalam operasional perusahaan, karena semakin tinggi kualitas pelaksanaan CSR, citra dan reputasi perusahaan cenderung akan dinilai lebih positif. CSR juga memiliki keterkaitan yang erat dengan agresivitas pajak, di mana perusahaan yang aktif menjalankan program CSR sering diasosiasikan dengan tingkat komitmen yang tinggi terhadap etika dan kepatuhan, termasuk dalam aspek perpajakan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat CSR yang baik umumnya menunjukkan kecenderungan lebih rendah dalam melakukan agresivitas pajak, karena implementasi CSR yang baik mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan [16]. Selain itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak juga didukung oleh penelitian lain dimana Ketika perusahaan memiliki nilai CSR lebih tinggi maka agresivitas pajak cenderung lebih rendah [23]. Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak bersifat kompleks dan tidak selalu konsisten. Beberapa hasil penelitian

mengindikasikan bahwa pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak tidak signifikan secara statistik. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun CSR sering diasosiasikan dengan perilaku perusahaan yang etis dan patuh terhadap regulasi, tidak selalu dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi secara otomatis memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan praktik agresivitas pajak [11]. Dengan adanya uraian diatas bisa ditarik sebuah hipotesis untuk pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

H3 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

D. *Corporate Governance* (Z) Memperkuat Manajemen Laba (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan, memegang peran krusial sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal dalam suatu entitas bisnis. Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam konteks perpajakan, agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kualitas penerapan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang baik berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tujuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi dan kewajiban moral serta hukum terhadap para pemangku kepentingan, termasuk negara. Oleh karena itu, *corporate governance* yang efektif diyakini mampu mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak [12]. Dalam teori keagenan yang menjadi teori dasar *corporate governance* merupakan alat utama untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Dengan adanya dewan komisaris independen, komite audit, pengawasan eksternal, serta kepemilikan institusional, manajer akan memiliki pengawasan yang kuat sehingga mengurangi kemungkinan mereka bertindak secara tidak etis. *Governance* yang efektif juga dapat menekan praktik manajemen laba, mengontrol agresivitas pajak, serta memastikan pelaksanaan CSR yang lebih akuntabel dan bukan sekadar formalitas. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya *Corporate governance* memperkuat hubungan anatara pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas dimana penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berperan sebagai dimana *Corporate Governance* tidak berfungsi sebagai variabel independen atau penjelas, melainkan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel utama yaitu manajemen laba dan agresivitas pajak. Indikator pengukuran *Corporate Governance* menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi pengaruh praktik manajemen laba terhadap kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak [24] [17]. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang lain dimana *Corporate Governance* memoderasi manajemen laba terhadap agresivitas pajak [13].

H4 : *Corporate Governance* Memperkuat Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

E. *Corporate Governance* (Z) Memperkuat Likuiditas (X2) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki peranan penting sebagai mekanisme pengendalian internal dalam suatu organisasi bisnis. Prinsip-prinsip dalam tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Dalam bidang perpajakan, agresivitas pajak merupakan salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh kualitas penerapan *corporate governance* [12]. Dalam teori keagenan yang menjadi teori dasar *corporate governance* merupakan alat utama untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Dengan adanya dewan komisaris independen, komite audit, pengawasan eksternal, serta kepemilikan institusional, manajer akan memiliki pengawasan yang kuat sehingga mengurangi kemungkinan mereka bertindak secara tidak etis. Selain itu likuiditas memiliki peranan yang penting terhadap agresivitas pajak, semakin baik likuiditas suatu perusahaan bisa dikatakan bahwa agresivitas pajak akan semakin kecil karena kemampuan perusahaan yang mampu untuk membayar kewajiban termasuk pajak. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dinyatakan bahwa *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dimana *corporate governance* berperan penting praktik

manajemen laba sehingga mampu untuk menganalisa apakah laporan keuangan perusahaan sedang sehat atau tidak termasuk dengan likuiditas, Ketika likuiditas sebuah perusahaan baik dengan adanya *corporate governance* yang baik maka perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak [6]. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang lain dimana Corporate Governance Memoderasi Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.

H5 : *Corporate Governance* Memperkuat Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

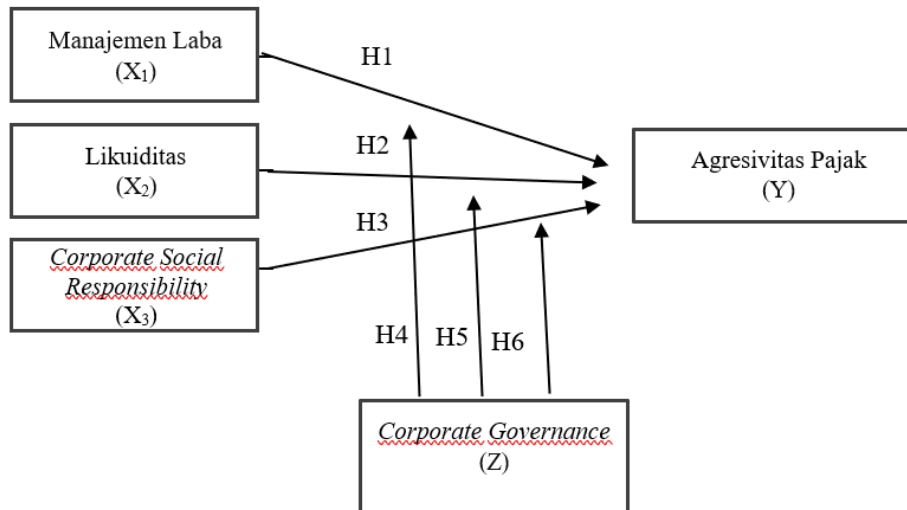
- F. *Corporate Governance* (Z) Memperkuat *Corporate Social Responsibility* (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y)
- Corporate governance* atau tata kelola perusahaan berfungsi sebagai salah satu mekanisme utama dalam pengendalian internal suatu entitas bisnis. Prinsip-prinsip tata kelola ini dirancang untuk menjamin bahwa operasional perusahaan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab yang tinggi. Dalam konteks perpajakan, kualitas implementasi *corporate governance* dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan [12]. Dalam teori keagenan yang menjadi teori dasar *corporate governance* merupakan alat utama untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Dengan adanya dewan komisaris independen, komite audit, pengawasan eksternal, serta kepemilikan institusional, manajer akan memiliki pengawasan yang kuat sehingga mengurangi kemungkinan mereka bertindak secara tidak etis. Dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat memperkuat hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak. Dalam hal ini, CSR tidak berperan sebagai variabel independen, melainkan sebagai variabel yang memperkuat keterkaitan antara tata kelola perusahaan dan kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Ketika praktik tata kelola perusahaan berjalan secara efektif, tingkat CSR yang diungkapkan perusahaan juga cenderung meningkat. Peningkatan ini memiliki korelasi positif terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa ketiganya saling berkaitan dalam membentuk strategi perpajakan perusahaan [9]. Namun tidak sejalan dengan penelitian ini Adapun studi yang mengatakan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *corporate governance* [1].

H6 : *Corporate Governance* memperkuat *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan penelitian. Kerangka konseptual yang akan diteliti yakni manajemen laba sebagai X_1 , Likuiditas sebagai X_2 , *Corporate Social Responsibility* sebagai X_3 , Agresivitas Pajak sebagai Y dan *Corporate Governance* sebagai Z .

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil kali ini berupa penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sudah terbukti secara ilmiah dimana penelitian ini menggunakan data berupa angka angka serta menggunakan analisis statistika [25]. Tujuan melakukan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa perusahaan Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 dengan total 17 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan peneliti agar data yang digunakan relevan dengan tujuan penelitian [26]. Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, di mana peneliti secara sengaja memilih sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian [27]. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel meliputi:

Tabel 3.1
Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2020–2024	39
2	Perusahaan makanan dan minuman yang tidak menerbitkan CSR selama periode 2020 – 2024	-14
3	Perusahaan makanan dan minuman yang mengalami kerugian selama periode 2020 – 2024	-8
Total Sampel		17
Total sampel x periode penelitian selama 5 tahun		85

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2025

Dalam proses pemilihan sampel yang dilakukan dengan metode purposive sampling, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 17 perusahaan dari sektor makanan dan minuman untuk periode waktu 2020–2024. Dengan demikian, diperoleh total 68 data observasi sebagai sampel penelitian. Adapun daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kriteria Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
4	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
6	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
7	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
10	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
11	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
12	MYOR	Mayora Indah Tbk
13	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
14	SKBM	Sekar Bumi Tbk
15	SKLT	Sekar Laut Tbk
16	STTP	Siantar Top Tbk
17	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2025

Tabel 5.1
Indikator Variable

Variabel	Definisi		Indikator	Sumber
Manajemen Laba (X1)	Strategi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memperbaiki citra keuangan	$\Delta E =$	$\frac{Eit - Eit - 1}{MVEt - 1}$	[17], [19]
Likuiditas (X2)	Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, yang mencerminkan kesehatan dan efektivitas manajemen keuangan.	CR =	$\frac{Aset}{Liabilitas}$	[20], [19]
Corporate Social Responsibility (X3)	Komitmen perusahaan menjalankan usaha secara etis untuk mencegah dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya	CSR _i =	$\frac{\sum x_{yi}}{Ini}$	[20], [21]
Agresivitas pajak (Y)	Strategi perusahaan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin	ETR=	$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	[12], [17]
Corporate Governance (Z)	Mekanisme untuk mengelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan melindungi kepentingan pemegang saham	DKI =	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$	[9], [28]

Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode tahun 2020 hingga 2023 Laporan keuangan tersebut diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.com) maupun melalui website masing-masing perusahaan yang menjadi objek penelitian. Informasi dalam laporan keuangan digunakan karena bersifat publik, terverifikasi, dan mencerminkan kondisi keuangan serta aktivitas operasional perusahaan secara transparan. Penggunaan data ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengumpulan data sekunder berbasis kuantitatif, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan pengujian empiris terhadap hubungan antar variabel dalam penelitian secara objektif dan terukur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengelola dan mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Smart PLS (*Smart Partial Least Square*). *Partial Least Square* (PLS) adalah metode analisis yang menggunakan model struktural dan memiliki kelebihan dalam membantu merancang serta mengembangkan teori baru [29]. Adapun kriteria kriteria pengujian sebagai berikut :

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

A. **Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)** yang bertujuan untuk menguji reliabilitas dari indikator masing-masing variabel laten. Dalam evaluasi outer model pada metode PLS, Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian. Suatu pengukuran dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas internal dilakukan menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha, dan hasilnya menunjukkan konsistensi internal yang memadai, terbukti dari nilai alpha yang melampaui ambang batas kritis sebesar 0,6.

B. **Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**, yang digunakan untuk menilai hubungan antar variabel laten melalui analisis nilai R-squared (R^2) serta pengujian hipotesis.

C. **Pengujian Hipotesis**, dimana pengujian hipotesis dalam SmartPLS dilakukan dengan melihat nilai t-statistik dan p-value. Hipotesis dianggap signifikan secara statistik dan diterima jika nilai t-statistik $> 1,96$ pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Sebaliknya, hipotesis ditolak jika nilai t tidak memenuhi ambang tersebut. Selain itu, nilai p-value juga menjadi indikator penting dalam pengujian: jika p-value $< 0,05$, maka hipotesis diterima; namun jika p-value $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

IV. HASIL DAN PEMBAASAN

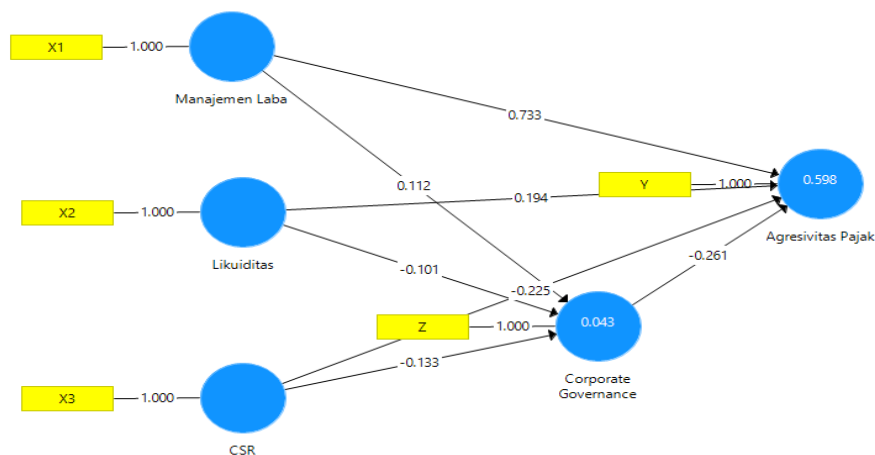
Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model

Model pengukuran (outer model) yang menggunakan indikator reflektif dievaluasi dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan dari setiap indikator yang digunakan. Validitas konvergen bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara tepat, sedangkan validitas diskriminan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Selain pengujian validitas, indikator-indikator tersebut juga dianalisis untuk mengetahui tingkat reliabilitas konstruk melalui pengukuran reliabilitas komposit. Reliabilitas komposit menunjukkan konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk laten. Seluruh pengujian tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Output analisis dari SmartPLS kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kelayakan model pengukuran yang dibangun. Berikut output yang diolah pada Smart PLS

Gambar 2.1.

Analisis Outer Model Sumber : Output SmartPLS Diolah 2026



Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian. Suatu pengukuran dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas internal dilakukan menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha, dan hasilnya menunjukkan konsistensi internal yang memadai, terbukti dari nilai alpha yang melampaui ambang batas kritis sebesar 0,6.

Tabel 6.1
Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Agresivitas Pajak	1,000	1,000
CSR	1,000	1,000
Corporate Governance	1,000	1,000
Likuiditas	1,000	1,000
Manajemen Laba	1,000	1,000

Sumber : Output SmartPLS Diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, semua variabel menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yang memenuhi ketentuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang ditetapkan.

Pengujian Inner Model R-Square

Pengukuran inner model dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten yang membentuk struktur model. Nilai R-square digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana variasi pengamatan dapat dijelaskan oleh model, serta untuk mengevaluasi hasil estimasi parameter yang diperoleh dari pengujian model.

Tabel 7.1
R Square

	R Square	R Square Adjusted
Agresivitas Pajak	0,683	0,654

Sumber : Output SmartPLS Diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai R-Square untuk variabel agresivitas pajak sebesar 0,683 Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas agresivitas pajak (Y) sebesar 68% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, yaitu Manajemen Laba (X1), Likuiditas (X2), CSR (X3), serta corporate governance (Z). Sedangkan sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model atau pembahasan pengujian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menilai adanya hubungan kausal antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), dengan mempertimbangkan peran variabel pemoderasi (Z). Proses ini bersifat inferensial dan mengacu pada interpretasi nilai P-Value. Apabila P-Value berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara konstruk-konstruk tersebut. Rincian hasil pengujian disajikan pada Tabel 10, yang memuat koefisien jalur (Path Coefficients), termasuk nilai Original Sample (O), Sample Mean (M), Standard Deviation (STDEV), T-Statistic (O/STDEV), serta P-Value, yang digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi kekuatan dan signifikansi hubungan antarvariabel.

Tabel 8.1
Path Coefficients

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Manajemen Laba -> Agresivitas Pajak	0.762	0.763	0.067	11.445	0.000
Likuiditas -> Agresivitas Pajak	0.168	0.176	0.066	2.546	0.001
CSR -> Agresivitas Pajak	-0.212	-0.222	0.079	2.690	0,007
Moderating Effect 1 -> Agresivitas Pajak	-0.160	-0.161	0.093	1.720	0.086
Moderating Effect 2 -> Agresivitas Pajak	0.104	0.102	0.045	2.334	0.020
Moderating Effect 3 -> Agresivitas Pajak	-0.177	-0.173	0.07	2.500	0.013

Sumber : Output SmartPLS Diolah, 2026

Pembahasan

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menunjukkan nilai P-Value < 0,05, yaitu sebesar 0.000 yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik. Hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H1 dapat diterima. Dengan kata lain, kemampuan perusahaan dalam mengelola manajemen laba terbukti memengaruhi tingkat agresivitas pajak yang diterapkan, menunjukkan bahwa praktik manajemen laba tidak hanya berdampak pada pelaporan keuangan tetapi juga menjadi bagian dari strategi perpajakan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kebijakan akuntansi untuk mengatur besaran laba yang dilaporkan, yang pada akhirnya akan memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu bentuk manajemen laba yang sering dilakukan adalah melalui pengaturan beban atau biaya perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat meningkatkan beban penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan yang mempercepat atau dengan meninjau kembali umur ekonomis aset menjadi lebih pendek. Dengan meningkatnya beban penyusutan, laba perusahaan akan menurun sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga menjadi lebih kecil. Praktik ini menunjukkan bahwa manajemen laba digunakan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan manajemen laba dengan mengakumulasikan berbagai penyesuaian biaya dari anak perusahaan atau cabang ke perusahaan induk. Sebagai contoh, perusahaan induk dapat menggabungkan beban operasional tertentu, seperti biaya administrasi, biaya penyusutan aset cabang, atau biaya pemeliharaan yang sebelumnya tersebar di beberapa cabang menjadi satu laporan di perusahaan induk. Dengan meningkatnya total beban pada perusahaan induk, laba konsolidasi perusahaan dapat ditekan sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik manajemen laba dapat menjadi bagian dari agresivitas pajak, di mana perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak melalui pengelolaan laporan keuangan secara strategis tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak [19], yang menunjukkan bahwa manajemen laba secara signifikan memengaruhi agresivitas pajak. Hasil ini menegaskan pentingnya pengendalian

dan pemantauan praktik manajemen laba dalam perusahaan, baik untuk menjaga kepatuhan perpajakan maupun untuk mengoptimalkan strategi perpajakan secara etis dan terukur.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menunjukkan nilai P-Value $< 0,05$, yaitu sebesar 0.001 yang menandakan adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance, sehingga H2 diterima. Dengan kata lain, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas memiliki peran penting dalam menentukan strategi perpajakan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan yang likuid memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus memanipulasi pelaporan atau mencari celah penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa likuiditas bukan hanya berfungsi sebagai indikator kesehatan keuangan, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan terkait strategi pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan strategi agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu contoh yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan meningkatkan atau mengakumulasi beban bunga dari pinjaman perusahaan. Perusahaan dapat menghitung dan mengakui seluruh beban bunga dari berbagai sumber pendanaan, baik dari pinjaman bank, obligasi, maupun pinjaman antar perusahaan dalam satu grup, sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Semakin besar beban bunga yang diakui, maka laba perusahaan akan menurun dan secara otomatis beban pajak yang harus dibayarkan juga menjadi lebih kecil. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki beberapa pinjaman dari berbagai cabang atau anak perusahaan dapat menggabungkan seluruh beban bunga tersebut dalam laporan keuangan konsolidasi. Dengan meningkatnya total beban bunga, laba kena pajak perusahaan akan berkurang sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini menunjukkan bahwa ketika likuiditas perusahaan rendah, manajemen cenderung memanfaatkan pengakuan beban bunga sebagai strategi untuk menekan laba dan melakukan agresivitas pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi tidak perlu melakukan strategi tersebut karena memiliki kemampuan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mengurangi laba secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak [5], yang menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, pengelolaan likuiditas yang baik dapat menjadi salah satu langkah perusahaan dalam menurunkan risiko pajak sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menunjukkan nilai P-Value $< 0,05$, yaitu sebesar 0.007 yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini menyimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H3 diterima. CSR merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana perusahaan menjalankan praktik yang sesuai dengan standar etika, regulasi, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki implementasi CSR yang baik cenderung memiliki komitmen lebih tinggi terhadap kepatuhan pajak, sehingga kemungkinan melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik CSR tidak hanya berdampak pada reputasi dan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga berperan dalam strategi perpajakan. Dengan kata lain, semakin baik pelaksanaan CSR suatu perusahaan, semakin kecil kecenderungan perusahaan tersebut untuk menghindari kewajiban pajak secara agresif. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan yang aktif melaksanakan CSR biasanya mengalokasikan sejumlah dana khusus untuk kegiatan sosial dan lingkungan yang dicatat sebagai beban atau biaya perusahaan. Beban CSR tersebut akan mengurangi laba perusahaan secara wajar dan transparan tanpa harus melakukan praktik agresivitas pajak. Selain itu, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial cenderung menjaga reputasi dan kepercayaan publik, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun citra negatif. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

di lingkungan pabrik yang berada di daerah pertanian dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar, seperti bantuan traktor, pembangunan irigasi, atau penyediaan pupuk bagi petani lokal. Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian fasilitas tersebut dicatat sebagai beban CSR dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya beban CSR tersebut, laba perusahaan akan berkurang secara wajar sehingga beban pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih rendah, tanpa harus melakukan strategi agresivitas pajak yang berisiko. Praktik ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menekan beban pajak melalui kegiatan yang bersifat sosial dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pelaksanaan CSR tidak hanya memberikan manfaat sosial dan lingkungan, tetapi juga membantu perusahaan dalam mengelola beban keuangan secara etis dan mengurangi kecenderungan melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya dimana CSR memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak [23], yang juga menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam mempengaruhi keputusan perpajakan.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperlemah Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menunjukkan nilai P-Value $> 0,05$, yaitu sebesar 0.086 yang menggambarkan bahwa corporate governance tidak memengaruhi hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₄ ditolak. Penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Dengan kata lain, keberadaan mekanisme corporate governance tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan secara langsung menjadi lebih baik, meskipun secara teoritis corporate governance diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif. Secara teoritis, corporate governance memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk praktik manajemen laba yang berpotensi berdampak pada strategi agresivitas pajak. Mekanisme corporate governance seperti dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta membatasi tindakan oportunistik manajemen. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Dalam konteks manajemen laba, corporate governance dapat dianggap belum berjalan secara profesional karena pengawasan yang dilakukan belum efektif dalam mendeteksi maupun membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Jika corporate governance tidak berpengaruh sebagai variabel moderasi, maka dapat diartikan bahwa keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi corporate governance belum berjalan secara efektif dan cenderung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi yang berlaku, tanpa adanya pengawasan yang benar-benar aktif terhadap kebijakan manajerial perusahaan. Akibatnya, praktik manajemen laba tetap dapat dilakukan oleh manajemen tanpa adanya kontrol yang memadai, sehingga corporate governance tidak mampu mengarahkan atau membatasi kebijakan perusahaan terkait agresivitas pajak. Ketidakefektifan peran corporate governance sebagai variabel moderasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penerapan tata kelola perusahaan yang masih bersifat formalitas, di mana keberadaan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi tanpa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kedua, kurangnya independensi dewan komisaris yang dapat memengaruhi objektivitas dalam mengawasi kebijakan manajemen. Ketiga, keterbatasan komite audit dalam mendeteksi praktik manajemen laba yang bersifat kompleks, terutama jika praktik tersebut dilakukan melalui kebijakan akuntansi yang masih berada dalam batas standar yang berlaku. Selain itu, keputusan terkait manajemen laba dan agresivitas pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan manajerial internal perusahaan dibandingkan oleh mekanisme pengawasan dari corporate governance. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme corporate governance belum efektif dalam mengendalikan ataupun mengarahkan praktik manajemen laba agar berdampak pada kebijakan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu meningkatkan kualitas

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

penerapan corporate governance, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan independensi, serta memperbaiki efektivitas komite audit agar tata kelola perusahaan dapat berperan secara optimal dalam membatasi praktik manajemen laba dan agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh [26], yang menunjukkan bahwa corporate governance tidak memperkuat pengaruh Manajemen Laba terhadap agresivitas pajak,

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperkuat Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menunjukkan nilai P-Value $< 0,05$, yaitu sebesar 0.020 yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini menyimpulkan bahwa corporate governance memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Dengan kata lain, ketika likuiditas perusahaan baik dan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif, kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak cenderung menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa peran corporate governance tidak hanya terbatas pada pengawasan manajemen atau kepatuhan formal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memperkuat efek positif likuiditas dalam mengurangi praktik agresivitas pajak. Peran corporate governance dalam hal ini dapat dilihat dari fungsi komisaris independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam pengelolaan likuiditas perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola dana likuid secara optimal, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ketika likuiditas perusahaan tinggi, komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk menggunakan dana tersebut secara lebih efisien, seperti untuk memenuhi kewajiban operasional, investasi produktif, serta kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu melakukan strategi agresivitas pajak karena kondisi keuangan yang stabil dan pengawasan yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh, maka hal ini mengindikasikan bahwa corporate governance dalam perusahaan telah berjalan secara profesional. Komisaris independen yang aktif dan independen mampu memastikan bahwa dana likuid perusahaan tidak disalahgunakan atau dialokasikan untuk kepentingan yang berisiko tinggi. Selain itu, keberadaan komisaris independen juga mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan, sehingga strategi yang diterapkan lebih terstruktur dan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Dalam kondisi ini, perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan didukung oleh corporate governance yang baik akan lebih mampu mengelola dana likuid secara optimal. Perusahaan juga menjadi lebih berani namun tetap terstruktur dalam menerapkan strategi efisiensi pajak yang tidak bersifat agresif, seperti memanfaatkan insentif pajak yang sah, mengatur waktu pembayaran kewajiban, serta mengoptimalkan perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, peran corporate governance melalui komisaris independen terbukti mampu memperkuat pengaruh likuiditas dalam menekan praktik agresivitas pajak serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh [24], yang juga menemukan bahwa corporate governance berperan penting dalam memoderasi hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan strategi perpajakan yang dilakukan.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini menunjukkan nilai P-Value $> 0,05$, yaitu sebesar 0.013 yang mengindikasikan bahwa pengaruh corporate governance sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan agresivitas pajak tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menyatakan bahwa ketika praktik tata kelola perusahaan dijalankan secara efektif, pengungkapan CSR perusahaan cenderung lebih tinggi. Dengan kata lain, penerapan corporate governance dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan CSR. Meskipun demikian, peningkatan praktik CSR memiliki korelasi positif terhadap agresivitas pajak, sehingga peran corporate governance berfungsi sebagai faktor penguat dalam hubungan CSR dan agresivitas pajak. Corporate governance berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan pelaksanaan CSR dan strategi perpajakan dilakukan secara terstruktur. Ketika corporate governance berjalan efektif, manajemen terdorong untuk

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

meningkatkan kegiatan CSR sekaligus mengelola beban perusahaan secara lebih optimal. Hal ini menyebabkan peningkatan CSR dapat diikuti dengan strategi pengelolaan pajak yang lebih terencana dan efisien. Peran corporate governance sebagai variabel moderasi juga terlihat dari fungsi komisaris independen dan komite audit dalam mengawasi alokasi dana CSR. Kegiatan CSR seperti pembangunan fasilitas masyarakat, bantuan alat pertanian, atau pemberdayaan lingkungan dicatat sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Dalam kondisi tata kelola yang kuat, pengeluaran CSR dilakukan secara lebih terarah sehingga berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, corporate governance memperkuat hubungan CSR terhadap agresivitas pajak karena tata kelola perusahaan yang efektif mampu mengarahkan pelaksanaan CSR tidak hanya sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan dan perpajakan perusahaan secara lebih terencana dan efisien.. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh [9], yang menunjukkan bahwa corporate governance dapat memperkuat pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, meskipun dalam konteks penelitian ini pengaruhnya tidak mencapai tingkat signifikansi statistik. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman perusahaan tidak hanya dalam menerapkan CSR, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pajak dijalankan secara etis dan terkendali.

V. KESIMPULAN

1. perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk mengatur laba yang dilaporkan. Dengan menekan laba melalui peningkatan beban atau biaya tertentu, perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.
2. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung melakukan strategi tertentu untuk menekan beban pajak guna menjaga kondisi keuangan perusahaan.
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan akan dicatat sebagai beban yang dapat mengurangi laba kena pajak. Semakin besar biaya CSR yang dikeluarkan, maka laba perusahaan akan menurun sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga menjadi lebih kecil.
4. *Corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan belum efektif dalam mengawasi praktik manajemen laba, sehingga keberadaan *corporate governance* tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak.
5. *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, tata kelola perusahaan yang baik membantu perusahaan mengelola dana likuid secara optimal dan mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat, sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah.
6. *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, *corporate governance* mendorong pelaksanaan CSR secara lebih terstruktur dan transparan. Biaya CSR yang meningkat dapat menurunkan laba kena pajak, sehingga tata kelola perusahaan memperkuat hubungan CSR terhadap agresivitas pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Manajemen Laba, Likuiditas, Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, kedua orang tua, serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini..

REFRENSI

- [1] R. W. Kurniawati, "Pengaruh Likuiditas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi," Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020.
- [2] E. Loevian Valencia, W. Hariyanti, And Y. Harjito, "Corporate Governance Sebagai Moderasi Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak," *Webinar Dan Call For Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, No. September, Pp. 167–181, 2022.
- [3] D. K. Wardani And A. J. Dodok, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen (Ebismen)*, Vol. 1, No. 3, Pp. 1–15, 2022.
- [4] R. Anan, H. Ayu, And K. Ida, "Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak," *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, Vol. 4, No. 4, Pp. 108–115, 2023.
- [5] D. Metha And D. Febriantina, "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak : Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," Vol. 7, No. 2, Pp. 70–80, 2022.
- [6] Handayani, H. Rahayu, And S. Mardiansyah, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, Vol. 4, No. 2, Pp. 311–320, 2021, Doi: 10.37481/Sjr.V4i2.282.
- [7] R. Rafli And D. R. Ananda, "Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan," Vol. 22, No. 1, Pp. 120–133, 2020.
- [8] A. A. Fahmi And P. H. Adi, "Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Pemoderasi Corporate Governance," *Perspektif Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Pp. 85–107, 2020, Doi: 10.24246/Persi.V3i2.P85-107.
- [9] D. Amalia, "Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak," *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, Pp. 232–240, 2021, Doi: 10.22225/Kr.12.2.1596.232-240.
- [10] D. K. Wardani And D. M. F. Baljanan, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Pp. 31–36, 2022, Doi: 10.53625/Juremi.V2i1.2199.
- [11] Z. Hanum And J. Faradila, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei," *Owner*, Vol. 7, No. 1, Pp. 479–487, 2022, Doi: 10.33395/Owner.V7i1.1114.
- [12] T. H. B. M. Tiodora And R. Dwi, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Corporate Governance," *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 12, No. 4, Pp. 1–13, 2023.
- [13] D. S. Ganjar, "Pengaruh Koneksi Politik, Gender Diversity, Corporate Social Responsibility, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- [14] E. K. Annisa, W. Isthika, P. S. Akuntansi, U. D. Nuswantoro, C. Intensity, And M. Laba, "Proceeding Sendiu 2021 Pengaruh Capital Intensity , Profitabilitas , Leverage Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019," No. 2018, Pp. 978–979, 2021.
- [15] Y. Alfiah And A. Mulyadi, "Pengaruh Return On Asset , Likuiditas , Corporate Social Responsibility , Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak The Effect Of Return On Asset , Liquidity , Corporate Social Responsibility , And Earnings Management On Tax Aggressiveness," Pp. 1–13.
- [16] N. Apriliana, "Pengaruh Likuiditas , Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak," Vol. 1, No. 1, 2022.
- [17] F. Kusumawati And D. Rahayu, "The Effect Of Corporate Social Responsibility , Intellectual Capital , And Company Size On Firm Value With Profitability As A Moderating Variable [Pengaruh Corporate Social Responsibility , Intellectual Capital , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Peru," Pp. 1–15, 2020.
- [18] M. Yang And T. Di, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan," Vol. 7, Pp. 479–487, 2023.
- [19] M. Ayunarko And H. Ernandi, "The Influence Of Corporate Social Responsibility , Company Size , Leverage , Profitability , Good Corporate Governance , On Tax Aggressiveness In Manufacturing Companies Listed On The Idx For The 2019 - 2022 Period [Pengaruh Corporate Social Responsibili," Pp. 1–17, 2022.

- [20] T. Di And B. E. I. Tahun, “Pengaruh Komisaris Independen , Intensitas Modal , Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa Yang,” Vol. 4, No. 2, 2020.
- [21] D. Corporate, G. Dalam, And M. Pengaruh, “Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas,” Vol. 22, No. 1, Pp. 120–133, 2020.
- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 2018.
- [23] A. F. Profitabilitas And P. Menggunakan, “Analisis Faktor-Faktor Profitabilitas Perusahaan Menggunakan Purposive Sampling Dan Regresi Berganda,” Vol. 9, No. 1, Pp. 105–114, 2016.
- [24] A. Sumaryati, “Pengaruh Multinasionalitas , Tax Haven , Dan Goodwill Terhadap Transfer Pricing Dengan Moderasi Political Connection,” vol. 4, no. 2, pp. 93–113, 2023.
- [25] H. Sofyani And R. Survei, “Penggunaan Teknik Partial Least Square (Pls) Dalam Riset Akuntansi Berbasis Survei,” Vol. 9, No. 1, 2025, Doi: 10.18196/Rabin.V9i1.26199.
- [26] J. Tanujaya And B. H. Simanjuntak, “The Impact Of Profitability And Earnings Management On Tax Aggressiveness With Corporate Governance As Moderating Variables (Study On Registered Energy Sector Companies On The Indonesia Stock Exchange In 2019-2021),” *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, Vol. 5, No. 3, Pp. 18024–18039, 2022,

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.